

Respon Warga Masyarakat Desa Rahayu terhadap Aksi Perusahaan Migas di Kabupaten Tuban

The Response of the Community of Rahayu Village to the Actions of Oil and Gas Companies in Tuban Regency

Evi Nur Kholifah

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga

Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia

Email: evikholifah14@gmail.com

Abstrak

Aksi perusahaan migas memberikan konsekuensi respon berbeda dari warga masyarakat, maka peneliti tertarik mengkaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami aksi perusahaan migas membebaskan lahan pertanian yang menimbulkan konsekuensi berupa respon warga masyarakat, dan memahami variasi relasi sosial perusahaan migas dengan warga masyarakat sekitar lokasi perusahaan migas. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Pengumpulan data kualitatif diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada 10 informan. Teknik analisis data menggunakan analisis etnografi dengan Teori Kontekstual Progresif Andrew P. Vayda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsekuensi respon berupa alasan pemilik lahan/ petani menerima aksi pembebasan lahan pertanian dikarenakan adanya faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah pusat dan intervensi pemerintah daerah, serta faktor internal berupa keuntungan dari harga tanah tinggi. Sebaliknya, respon berupa alasan pemilik lahan menolak aksi pembebasan lahan disebabkan oleh faktor eksternal berupa kehadiran pihak asing (*Londho*) dan perusahaan migas memberikan harga beli yang rendah, serta adanya faktor internal berupa kehilangan mata pencaharian sebagai petani.

Kata kunci: perusahaan migas, aksi dan konsekuensi, pembebasan lahan pertanian, respon

Abstract

*The actions of oil and gas companies have consequences for social relations with community members, so researchers are interested in studying more deeply. This study aims to understand the actions of oil and gas companies to free up agricultural land which has consequences for the community, and to understand the variations in the social relations of oil and gas companies with residents of the community around the location of oil and gas companies. The research method used is ethnography. Qualitative data collection was obtained through observation and in-depth interviews with 10 informants. The data analysis technique used ethnographic analysis with Andrew P. Vayda's Progressive Contextual Theory. The results showed that, the consequences of the reason land owners/farmers accepted the action of land acquisition were due to external factors such as central government policies and local government intervention, as well as internal factors in the form of profits from high land prices. On the other hand, the reason land owners refuse to acquire land is caused by external factors such as the presence of foreign parties (*Londho*) and oil and gas companies providing low purchase prices, as well as internal factors such as loss of livelihood as farmers.*

Keywords: oil and gas companies, actions and consequences, agricultural land acquisition, social relations

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, salah satunya ialah minyak dan gas bumi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut sangatlah vital sehingga lazim untuk dieksplorasi dan dikelola dengan sebaik mungkin agar bisa membantu meningkatkan perekonomian negara, juga untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Negara

Kesatuan Republik Indonesia menyerahkan sumber daya alam minyak dan gas bumi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS) untuk dikelola dengan baik.

Selama proses eksplorasi dan pengolahan minyak dan gas bumi ada banyak pihak dan elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya. Hal itu dikarenakan tidak semua perusahaan Migas berdiri di tanah lapang yang tidak berpenghuni, sebagian besar justru berdiri di kawasan padat penduduk. Ketika perusahaan Migas berdiri di kawasan padat penduduk maka diperlukan upaya untuk bernegosiasi dengan warga masyarakat sekitar agar mereka mau membebaskan tanahnya. Berawal dari situlah hubungan antara pihak perusahaan Migas dengan warga masyarakat terbentuk.

Mahadi Fajar dan Estuning Tyas Wulan Mei (2019) mengatakan bahwa sikap masyarakat terhadap Pertambangan Minyak Di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro sangat setuju jika kegiatan pertambangan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka tidak setuju jika dampak pertambangan yang merusak lingkungan. Abdul Rohman Zaki, Abdul Hakim, dan Farida Nuraini (2013) meneliti Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). Simpulan mereka menunjukkan bahwa terjadi peralihan mata pencaharian masyarakat sekitar tambang dari sektor pertanian ke sektor tambang. Tingkat pendapatan masyarakat setelah adanya pertambangan lebih baik dan sejahtera. Secara kontradiktif hasil penelitian lain, yang dilakukan 5 tahun kemudian tentang Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Petani Sekitar Lokasi Pertambangan Banyu Urip Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro oleh Aziz Bahtiar Rifa'i dan Fadjar Hari Mardiansjah (2018). Simpulan mereka bahwa keberadaan industri pertambangan minyak terhadap kondisi sosial ekonomi belum berdampak positif. Penelitian Swastika Rahajeng Wihartina (2015), tentang Dampak Eksploitasi Minyak Bumi Banyu Urip Terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar Lokasi Pertambangan (Di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). Simpulannya telah terjadi perubahan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Mojodelik utamanya dalam hal pekerjaan dan pendapatan. Selain itu perubahan juga terjadi pada alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan. Hasil ganti rugi lahan pertanian tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua warga di Desa Mojodelik.

Suma Listyani (2018) meneliti Dampak Industri Pertambangan Minyak Bumi Terhadap Perubahan Struktur Sosial Ekonomi di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, simpulannya bahwa dengan adanya industri pertambangan minyak bumi berdampak baik pada perubahan struktur sosial maupun struktur ekonomi masyarakat di Desa Rahayu. Petani beralih profesi menjadi peternak, buruh, pedagang dan lainnya, sehingga ada peningkatan pendapatan.

Penelitian Amin Hassan (2013) tentang Review of The Global Oil And Industry: A Concise Journey From Ancinent Time to Modern World, menunjukkan bahwa sejarah eksplorasi minyak dan gas bumi dari zaman kuno hingga zaman modern telah berkembang dari negara Amerika ke negara lainnya. Bukti atas rangkaian sejarah tersebut menunjukkan jika sejak jaman dahulu minyak bumi berkaitan dengan aktivitas manusia. Sesudahnya kaitan ini juga Nampak pada penelitian Yasir Nahar (2014) tentang Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility*,

menyimpulkan pelaksanaan CSR perusahaan belum cukup memuaskan. Senada dengan ini penelitian Stanley Ngene, Kiran Tata-Maharaj, Paul Eke, dan Collin Hils (2016) menyimpulkan adanya ketergantungan dunia terhadap minyak mentah dan gas alam sebagai energi dan bahan baku, untuk itu perlu diperhatikan pula kondisi lingkungan hidup agar tidak terkontaminasi dengan minyak mentah, gas alam, air yang diproduksi, limbah padat dan senyawa lainnya yang diperlukan dalam proses produksi. Penelitian lain menunjukkan hasil sama dari Kukuh Prasetyo Jati, Heribertus Sugiyanto, dan Chatarina Muryani (2017) bahwa timbul dampak penambangan minyak tradisional terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, khususnya menurunnya kualitas air (Studi Kasus Desa Ledok Kecamatan sambong Kabupaten Blora).

Berbicara mengenai aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi, banyak sekali topik bahasan yang menarik untuk dibicarakan. Dari sudut pandang ilmu kesehatan misalnya, eksplorasi sumber daya alam sebisa mungkin untuk tidak membawa dampak buruk bagi makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Kemudian dari sudut pandang ilmu sosial, proses sosial yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait agaknya menarik untuk dibicarakan, sebab, biar bagaimanapun ‘hiruk-pikuk’ aktivitas eksplorasi bersinggungan langsung dengan masyarakat yang notabene terlebih dulu ada dan tinggal di wilayah yang hendak diubah menjadi area eksplorasi. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi.

Salah satu perusahaan Migas yang berdiri di kawasan padat penduduk ialah PT. Pertamina EP Cepu (PEP-C). Perusahaan tersebut berada di wilayah Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Hubungan yang terjalin antara perusahaan migas dengan warga masyarakat Desa Rahayu bisa timbul salah satunya dikarenakan adanya interaksi yang berlangsung selama pembebasan lahan. Aksi pembebasan lahan oleh perusahaan migas telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat maupun daerah. Akan tetapi, realisasi izin lebih mudah jika mendapatkan izin dari warga masyarakat setempat mengingat lahan yang dibebaskan seluruhnya masih berstatus milik warga. Maka dari itu, agar kehadirannya diterima baik oleh warga masyarakat Desa Rahayu, perusahaan migas perlu menjalin relasi sosial yang menguntungkan.

Fenomena bagaimana respon warga masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban terhadap aksi PT. Pertamina EP Cepu (PEP-C), menarik minat peneliti untuk mengkajinya dari perspektif Antropologi Ekologi. Peneliti tertarik untuk mendalami aksi perilaku perusahaan migas yang menimbulkan konsekuensi bagi lingkungan fisik maupun respon warga. Adapun konsekuensi lingkungan fisik berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aksi perilaku perusahaan berupa suara bising, suhu udara yang panas, dan bau menyengat. Sedangkan konsekuensi respon warga berupa relasi sosial bisa dikaji dengan melihat hubungan yang terjalin antara perusahaan Migas dengan warga masyarakat Desa Rahayu baik hubungan positif maupun sebaliknya.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, peneliti dapat merumuskan fokus penelitian pada dua aspek. *Pertama*, penelitian ini mengkaji proses pembebasan lahan milik warga masyarakat Desa Rahayu yang dilakukan oleh perusahaan migas. *Kedua*, penelitian ini juga tertarik untuk meneliti hubungan (relasi) aksi perusahaan migas dan konsekuensi respon warga

masyarakat Desa Rahayu dalam konteks waktu. Kedua fokus permasalahan itulah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian etnografi. Tujuannya ialah untuk menggambarkan secara holistik mengenai respon reaksi warga masyarakat Desa Rahayu terhadap aksi pembebasan lahan pertanian menjadi lahan industri hulu migas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian etnografi, maka dari itu data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Penelitian yang termasuk penelitian etnografi ini bersumber pada penelitian lapangan (*field work*) juga bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena sosial yang dilihat berdasarkan sudut pandang penduduk asli daerah yang diteliti (*native point of view*). Penelitian etnografi juga mengikutsertakan aktivitas belajar tentang dunia orang yang telah belajar melihat, mendengarkan, berbicara, berpikir serta bertindak menggunakan cara tertentu (Spradley, 2006:4).

Penelitian ini dilakukan di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tepatnya di wilayah yang menjadi tempat berdirinya perusahaan Migas yang dikelola oleh PT. Pertamina EP Cepu (PEP-C) yang sebelumnya dikelola oleh dua anak perusahaan yakni PT. Pertamina EP Asset 4 dan Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (PHE TEJ). Adapun alasan yang melatar belakangi peneliti untuk memilih lokasi tersebut ialah, *pertama*, perusahaan migas yang saat ini dikelola oleh PT. Pertamina EP Cepu (PEP-C) berdiri di tengah kawasan yang padat penduduk dan berdampingan langsung dengan lahan pertanian. *Kedua*, Perusahaan migas PT. Pertamina EP Cepu (PEP-C) tercatat paling luas lahannya diantara perusahaan migas lain yang ada di Kabupaten Tuban. *Ketiga*, lahan yang digunakan untuk kegiatan industri hulu migas awalnya merupakan lahan pertanian milik warga masyarakat Desa Rahayu.

Adapun tahap pengumpulan data dalam penelitian ini mengutamakan pada proses observasi terkait kegiatan yang dilakukan warga khususnya petani di sekitar lokasi perusahaan, tenaga kerja warga lokal di perusahaan tersebut. Wawancara mendalam guna memperoleh data kualitatif kepada 10 informan. Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data menggunakan teori kontekstual progresif dari Andrew P.Vayda yang menjelaskan tentang aksi manusia beserta konsekuensinya berupa respon baik secara terduga maupun tidak terduga (Saharuddin, 2007:63).

Hasil dan Pembahasan

Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas bumi atau dikenal dengan sebutan Migas membutuhkan lahan yang cukup luas untuk mendukung produktivitas perusahaan. Aksi pembebasan lahan dalam konteks waktu ketika Indonesia berusaha untuk mencukupi kebutuhan minyak dan gas nasional, sehingga dilakukan eksploitasi dan eksplorasi di berbagai daerah. Salah satu industri hulu Migas yang berada di area pemukiman bisa ditemukan di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Guna menghadapi situasi tersebut, maka terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi pemilik lahan untuk menerima pembebasan lahan dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor Eksternal yang Mendukung Aksi Pembebasan Lahan

Aksi pembebasan lahan oleh perusahaan Migas di Desa Rahayu diwarnai proses negosiasi yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemilik lahan dan perusahaan Migas saja. Ada pengaruh pihak eksternal yakni dari pemerintah pusat maupun daerah yang berupaya untuk mengintervensi pengambilan keputusan petani yang sedang bernegosiasi dengan perusahaan. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah ialah terkait dengan izin tambang minyak dan gas bumi yang dipermudah. Dengan diberikan izin tersebut maka perusahaan Migas memiliki hak untuk membebaskan lahan milik warga setempat guna mendukung aktivitas produksi perusahaan. Bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah pusat juga berpengaruh terhadap pemerintah daerah pada saat proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah merupakan *stakeholder* yang berperan penting dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah senantiasa terlibat dalam proses negosiasi antara pemilik tanah dengan perusahaan.

Intervensi Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan izin kepada industri hulu Migas untuk melakukan aksi dengan beroperasi di Desa Rahayu berpengaruh pada pengambilan keputusan pemilik lahan selama proses negosiasi pembebasan lahan. Pemerintah mengatakan bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tak terbarukan dimana dalam proses eksploitasinya dikuasai oleh negara. Sumber daya alam itu adalah komoditas vital yang dimiliki oleh negara. Atas dasar itulah, pada akhirnya pemilik lahan bersedia untuk menyerahkan lahannya kepada perusahaan dengan cara dibeli secara penuh ataupun disewa.

Selama proses peralihan fungsi lahan, warga yang lahannya terkena dampak pembebasan lahan sempat berubah pikiran dimana pada awalnya mereka menolak kehadiran industri hulu Migas, akan tetapi dikarenakan ada campur tangan pemerintah, warga yang menolak tersebut kemudian menerima lahannya dibebaskan oleh perusahaan Migas. Berdasarkan temuan data di lapangan, perubahan sikap tersebut dikarenakan masyarakat Desa Rahayu kala itu masih terbayang-bayang oleh „keganasan“ pemerintah Orde Baru yang tidak segan untuk melenyapkan warga yang berusaha melawan keputusan pemerintah. Apalagi sumber daya manusia di Desa Rahayu kala itu masih tergolong rendah sehingga rentan terhadap tekanan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Adapun informasi dari informan aparat pemerintah lokal sebagai berikut:

“Jadi kan berbeda jamannya ya, jadi masyarakat pada sekitaran tahun 93 itu masyarakat Rahayu khususnya ini masih opo yo ekonomi e masih rendah-rendah. Istilahnya masih takut sama pemerintah, ketika pemerintah sudah memutuskan ini ndak mungkin berani membantah masyarakat”

Adanya tekanan dari pemerintah membuat warga setempat ‘mati kutu; dan berada pada kondisi yang tidak berdaya. Meskipun sebetulnya mereka enggan untuk melepaskan lahannya diambil alih oleh industri hulu Migas, namun dikarenakan ada bayang-bayang pemerintah akhirnya warga dengan berat hati menerima pembebasan lahan. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan

pemerintah Orde Baru yang otoriter rupanya berpengaruh besar pada sikap dan keputusan petani Desa Rahayu yang kala itu sedang melakukan negosiasi lahan dengan industri Hulu Migas.

Adanya unsur pemaksaan membuat pemilik lahan tidak bisa berbuat banyak, sebab, jikalau menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka ada konsekuensi yang harus diterima. Dalam hal ini jika dilihat dari konteks waktu maka warga setempat pada saat proses pembebasan lahan masih takut dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Warga setempat memilih respon untuk *sendiko dawuh* atau menuruti segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun sebetulnya menolak.

Warga setempat yang memiliki sawah tidak mau mengambil resiko sehingga responnya mengiyakan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa di balik sikap pemilik lahan yang bersedia menyerahkan lahannya untuk dibeli industri hulu Migas, ada rasa ketakutan dan kekhawatiran yang melatar belakungnya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh informan Tenaga Kerja Lokal dan Petani yang tidak mendapatkan sewa sebagai berikut:

“Untuk cerita gini ya, sebelum tahun depalan eh sembilan tujuh itu kan waktu Pak Harto belum lengser itu masyarakat serba takut kan. Contoh Nggandu tahun berapa itu, per meter cuma dua ribu lima ratus... *iku engko nek gaoleh... sampean malah digowo nok kantor polisi!*, dulu-dulunya gitu ceritanya, itu betulan itu serius. Bayangno, dua ribu lima ratus per meter”.

Intervensi Pemerintah Daerah

Bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah pusat juga berpengaruh terhadap pemerintah daerah pada saat proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah merupakan *stakeholder* yang berperan penting dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah senantiasa juga melakukan aksi terlibat dalam proses negosiasi antara pemilik tanah dengan perusahaan. Adapun pemerintah daerah yang dimaksud ialah pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Pemerintah Desa Rahayu merupakan pihak yang menghubungkan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, ibaratnya sebagai “jembatan” antara warga dengan pihak perusahaan. Sebagai pihak yang dinilai lebih dekat dan sering berinteraksi langsung dengan warga Desa Rahayu, pemerintah desa sesungguhnya diharapkan warga yang terkena lahannya, mampu menjadi penengah antara perusahaan dan masyarakat. Melalui forum komunikasi dua arah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, petani yang lahannya dibebaskan menyampaikan pendapat agar didengar langsung oleh perusahaan Migas. Alih-alih menjadi mediator, pemerintah desa justru mengintervensi suara dan keputusan yang diambil oleh para petani atau pemilik lahan. Pada akhirnya dengan penuh keterpaksaan, petani merespon dengan bersedia untuk menerima pembebasan lahan.

Dengan adanya aksi intervensi dari pihak eksternal mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga pemerintah desa, pemilik lahan yang telah memiliki hak penuh atas tanahnya masing-masing terpaksa dengan merespon merelakan aset yang dimilikinya itu untuk dibeli ataupun disewa oleh perusahaan. Meskipun status dari lahan tersebut sudah hak milik masing-masing warga Desa

Rahayu, namun mereka tetap saja tidak dapat dengan mudah menentukan keputusan sesuai dengan keinginannya. Dalam konteks eksternal segala bentuk tekanan dari pihak luar sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Kondisi sumber daya manusia yang masih rendah, ditambah dengan taraf ekonomi yang rendah pula mengakibatkan masyarakat di Desa Rahayu berada pada posisi yang tidak berdaya sehingga rentan terhadap adanya pengaruh dari luar, termasuk intervensi dari pemerintah atas keputusan yang mereka ambil.

Faktor Internal yang Mendukung Aksi Pembebasan Lahan

Keputusan yang diambil oleh pemilik lahan untuk menerima aksi lahan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ada pula faktor internal, khususnya aspek sosial budaya yang melatar belakangi mereka dalam mengambil keputusan. Adapun alasan pemilik lahan menerima aksi pembebasan lahan pertanian menjadi lahan industri hulu Migas dilihat dari faktor internal ialah kenaikan harga tanah dan pemilik lahan mengharap keuntungan menjual lahan dengan harga yang setinggi-tingginya.

Kenaikan Harga Tanah Membuat Warga *Bungah/Gembira*

Pada dasarnya di balik respon kerelaan hati pemilik lahan menerima aksi pembebasan lahan, ada sebuah permintaan dari mereka agar tanahnya dibeli ataupun disewa dengan harga yang cukup tinggi, dengan begitu mereka dapat dengan mudah menyerahkan lahan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, pada mulanya pemilik lahan enggan untuk menyerahkan lahan yang dimilikinya kepada perusahaan, dengan alasan harga beli ataupun harga sewa yang ditawarkan sangat rendah. Namun, melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan melibatkan perwakilan pemilik lahan, perusahaan, pemerintah desa, dan pemerintah daerah disepakati harga beli dan harga jual yang tidak merugikan salah satu pihak.

Pada situasi tersebut, akhirnya pemilik lahan bersepakat untuk menerima tawaran dari perusahaan, sehingga lahan milik mereka sudah resmi diserahkan kepada perusahaan entah untuk dibeli maupun disewa. Harga awal sebesar Rp 1.700,00/m² yang ditolak oleh para petani dikarenakan nilainya terlalu rendah, akhirnya menemui titik terang pada harga Rp 2.700,00/m². Harga tersebut disepakati oleh pemilik lahan untuk pembebasan lahan pertanian yang kemudian dijadikan lahan industri hulu Migas. Hal ini dibuktikan dengan keterangan informasi dari Bapak Roni selaku pemilik lahan dan perangkat Desa Rahayu sebagai berikut:

“Dulu nawarnya seribu...seribu per meter persegi...terus naik seribu tujuh ratus...tetap *gak*/tidak mau...pada akhirnya petani melalui perwakilan almarhum bapak saya itu akhirnya jadi dua ribu tujuh ratus”.

Alih-alih menolak aksi pembebasan lahan, pada dasarnya pemilik lahan sedang „jual mahal“ kepada perusahaan agar aset yang dimiliki tersebut dapat dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Proses negosiasi cenderung berjalan lambat karena pemilik lahan masih belum rela jika lahannya dibeli dengan harga yang rendah. Mereka berharap lahannya dapat dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sangat tinggi. Di situlah letak kerumitan proses negosiasi, sehingga pemerintah hadir untuk menjembatani kedua belah pihak tersebut agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan perusahaan pun tidak merasa dimanfaatkan.

Mengharap Keuntungan

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemilik lahan cenderung memiliki motif cari untung dan memanfaatkan momen agar bisa menjual lahan dengan harga yang setinggi-tingginya. Hal itu dikarenakan, setelah lahannya dibebaskan oleh perusahaan, mereka kehilangan satu-satunya mata pencaharian. Menurut informasi, pada tahun 1993, mayoritas masyarakat Desa Rahayu bekerja di sektor agraris dan sisanya menjadi pengrajin anyaman. Dari dua sektor pekerjaan tersebut, keduanya belum mampu menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat, dalam kata lain pendapatan yang diperoleh dari petani maupun pengrajin belum mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Apalagi sektor agraris, banyak sekali kendala yang harus dihadapi kala itu. Sehingga dengan hadirnya perusahaan di tengah masyarakat, seolah membawa angin segar bagi mereka. Ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan agar memperoleh keuntungan.

Pada mulanya muncul respon gejala-gejala perlawanan dari masyarakat terutama para pemilik lahan, tetapi setelah melalui proses negosiasi dan perhitungan yang matang, penolakan tersebut berubah menjadi penerimaan dari pemilik lahan untuk menyerahkan lahannya kepada perusahaan, sebab, setelah dihitung memang hasilnya lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bercocok tanam. Dengan demikian, konteks internal atau sosial budaya yang berkembang dipengaruhi oleh keinginan masyarakat. Dengan adanya pemenuhan kesepakatan kenaikan harga tanah maka pemilik lahan bersedia untuk menjual tanahnya kepada pihak perusahaan Migas. Selain itu, terdapat maksud dan tujuan pemilik lahan yakni mengharapkan keuntungan dari pembebasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan.

Faktor Eksternal yang Menghambat Aksi Pembebasan Lahan

Aksi Industri Hulu Migas sudah ada sejak tahun 1950-an didasari asal usul mengapa respon petani terpaksa menerima ganti rugi yang kurang menguntungkan. Sebagaimana industri Hulu Migas di Desa Rahayu dalam sejarahnya, pihak-pihak yang terlibat juga tidak lepas dari kehadiran Warga Negara Asing (WNA) alias bukan hanya melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, anggapan bahwa orang asing merupakan penjajah bangsa Indonesia masih melekat di pikiran masyarakat.

Hadirnya 'Londo'/Belanda Warga Negara Asing

Muncul rasa enggan dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat kehadiran pihak-pihak yang berasal dari luar. Kemudian masyarakat menyebutnya dengan sebutan "Wong Londho" yang artinya ditujukan untuk orang asing yang pernah menjajah dan membuat sengsara bangsa Indonesia. Warga masyarakat di Desa Rahayu menaruh prasangka buruk atas hadirnya pihak asing "Londho". Selain itu, Perusahaan memberikan harga beli yang rendah sehingga aksi pembebasan lahan oleh perusahaan Migas mendapat reaksi penolakan dari pemilik lahan/ petani.

"Bahkan waktu sembilan tiga Pertamina mau mencari pekerja di Rahayu susah, sampe door to door. Coro bahasane ngunu wong mergawe gaada yang mau, karena mereka masih opo... yo berfikiran orang luar negri, bule dalam tanda kutip wong Jowo nek ngarani "Londho" ya, wong gek biyen jajah kok saiki ape dieloki mergawe kan seperti itu, masih melekat. Dendamnya mereka masih melekat, padahal juga belum tentu orang Belanda, walaupun yang disini Bule gitu".

“Bahkan waktu tahun sembilan puluh tiga, Pertamina ingin mencari pekerja di Rahayu susah sampai dari rumah ke rumah. Ibarat kata orang tidak ada yang mau, karena mereka masih berpikiran orang luar negeri atau bule yang dalam tanda kutip orang Jawa menyebutnya “Belanda”, yang dahulu menjajah kenapa sekarang ingin diikuti kerja, hal seperti itu masih melekat. Dendamnya mereka masih melekat, padahal juga belum tentu orang Belanda, walaupun yang disini orang luar negeri begitu”.

Perilaku masyarakat khususnya pemilik lahan/ petani atas latar belakang sejarah di masa lalu tersebut membuat adanya sikap penolakan atas kehadiran pihak-pihak eksternal. Masyarakat yang sudah nyaman dengan lingkungan alam yang digelutinya selama berpuluh-puluh tahun sebagai lahan pertanian, tentunya memiliki perasaan berat hati ketika lahan pertaniannya dibebaskan untuk dijadikan industri hulu Migas.

Harga Beli yang Relatif Rendah

Konteks birokrasi atau kebijakan pemerintah dalam aksi pembebasan lahan pertanian menjadi lahan industri hulu Migas memiliki sumbangsih terkait perubahan pengambilan keputusan dan perilaku petani untuk bersikap menerima atau bahkan menolak. Aksi pembebasan lahan oleh perusahaan Migas mendapat reaksi atau respon penolakan dari pemilik lahan/ petani. Hal ini dikarenakan harga pembelian yang ditawarkan dirasa masyarakat sangat rendah yakni sebesar Rp 1.700,00/m².

Perihal permasalahan harga tanah yang dianggap terlalu rendah membuat masyarakat merasa enggan untuk melepaskan hak miliknya, sebab lahan pertanian merupakan tempat mereka bekerja dan mencari nafkah. Jika harga yang diberikan terlalu rendah maka petani tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan tersebut untuk membeli lahan pertanian baru ditempat yang berbeda. Hal ini mengingat bahwa pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat di Desa Rahayu, maka jika tidak memiliki lahan pertanian masyarakat kebingungan dalam hal pemerolehan pekerjaan. Pendidikan dan kemampuan SDM yang masih rendah pada kala itu membuat masyarakat tidak punya keahlian lain untuk bekerja di bidang non pertanian. Dengan demikian, petani harus mencari lahan pertanian baru yang jaraknya lebih jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, jika harga pembelian rendah maka petani tidak dapat membeli lahan pertanian baru sebagai tempat mereka bekerja.

Faktor Internal yang Menghambat Aksi Pembebasan Lahan

Selain alasan penolakan di atas, ada alasan lain yang melatar belakangnya. Sebagian lahan di Desa Rahayu awalnya merupakan lahan pertanian yang kini menjadi area eksplorasi minyak dan gas bumi akibat aksi pembebasan lahan oleh perusahaan Migas. Respon warga Desa Rahayu yang menolak aksi pembebasan lahan dilatar belakangi oleh kondisi sosial budaya, dimana sektor agraris merupakan sumber utama mata pencaharian mereka. Masyarakat khawatir manakala lahan pertanian berubah menjadi lahan industri hulu Migas, mereka kehilangan pekerjaan yang berpengaruh pada hilangnya sumber pendapatan

Kehilangan Mata Pencaharian

Respon warga Desa Rahayu yang menolak aksi pembebasan lahan dilatar belakangi oleh kondisi sosial budaya, dimana sektor agraris merupakan sumber utama mata pencaharian mereka. Masyarakat khawatir manakala lahan pertanian berubah menjadi lahan industri hulu Migas, mereka kehilangan pekerjaan yang berpengaruh pada hilangnya sumber pendapatan. Maka dari itu, pada mulanya memang para pemilik lahan agak keberatan untuk menyerahkan lahan untuk dibebaskan. Membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi perusahaan untuk bernegosiasi dengan para pemilik lahan untuk merumuskan sebuah kesepakatan. Atas dasar potensi dan “desakan” dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itulah masyarakat di Desa Rahayu secara terpaksa maupun tidak harus menerima fakta bahwa sebagian wilayahnya dibebaskan menjadi industri hulu Migas.

Produktivitas Pertanian Menurun

Aspek sosial budaya di Desa Rahayu rupanya berhubungan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Para pemilik lahan sangat menyayangkan aksi pembebasan lahan pertanian menjadi industri hulu Migas, sebab, pekerjaan yang telah digeluti selama bertahun-tahun dan dilakukan secara turun-temurun itu terpaksa harus terhambat produktivitasnya. Kehadiran perusahaan dikhawatirkan dapat mengganggu hasil panen pemilik lahan/ petani karena mendapat pengaruh dari flare yang berakibat pada pencahayaan dan suhu udara yang panas serta polusi udara yang terjadi setiap hari sehingga mengakibatkan produktivitas Pertanian menurun. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Bapak Jon selaku anggota LSM yang bergerak di bidang Lingkungan sebagai berikut:

“Emm kalo siang dan malam cahaya terus-terusan...otomatis pertumbuhan tanaman yang ditanaman masyarakat sekitar ndak bisa bagus ya mbak...karena tumbuhan tadi bekerjanya terus...ndak ada istirahat...siang dan malam kan gak ada bedanya...pasti ada cahaya”.

Dengan karakteristik masyarakat yang homogen, Desa Rahayu dihuni oleh penduduk yang sebagian besar memiliki pekerjaan yang sama sebagai petani. Dapat diketahui bersama pula bahwa sektor pertanian tidak serta merta bisa berdiri sendiri, kondisinya sangat ditentukan oleh alam dan bergantung pada iklim sekaligus cuaca yang sedang terjadi. Manakala alam tidak sedang „bersahabat“ dengan petani, maka produktivitas sektor pertanian terancam mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan, setelah ada aktivitas produksi di area industri hulu Migas timbul beberapa masalah lingkungan salah satunya ialah polusi udara yang berakibat pada menurunnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara di Desa Rahayu. Dengan begitu, alam menjadi tidak bersahabat dengan petani. Potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi juga dapat menggeser produktivitas pertanian, sebab lahan pertanian berkurang jumlahnya. Komoditi minyak dan gas bumi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Kaitannya dengan konteks waktu setelah kurang lebih 33 tahun perusahaan migas beroperasi, hubungan aksi perusahaan migas dan konsekuensi tercermin dalam relasi sosial, antara lain: 1) relasi sosial yang menguntungkan antara perusahaan migas dan pemilik lahan; 2) relasi sosial yang merugikan petani yang tidak mendapatkan sewa dari perusahaan migas, 3) relasi sosial yang menguntungkan antara perusahaan migas dan tenaga kerja lokal, karena ada warga lokal yang bekerja di perusahaan migas.

Variasi Relasi Sosial Perusahaan Migas Dengan Warga Masyarakat Di Sekitar Lokasi Perusahaan Migas

Aktivitas industri hulu Migas di Desa Rahayu menjadi perangsang terciptanya hubungan/ relasi antara manusia dengan lingkungan. Relasi tersebut muncul ditandai dengan adanya aksi pembebasan lahan pertanian menjadi lahan industri hulu Migas. Aksi pembebasan lahan oleh perusahaan Migas itulah yang memicu timbulnya konsekuensi berupa interaksi sosial antara perusahaan Migas dengan warga masyarakat di Desa Rahayu khususnya pemilik lahan. Interaksi yang terjalin antara kedua belah pihak tersebut berawal dari adanya transaksi negosiasi untuk pembebasan lahan pertanian menjadi lahan industri hulu Migas.

Tercemarnya lingkungan alam tersebut pada akhirnya berpengaruh pada produktivitas sektor pertanian yang mengalami penurunan. Atas fenomena tersebut, teretuslah tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada petani yang terdampak kegiatan operasional perusahaan Migas. Dengan adanya tanggung jawab sosial tersebut, mengindikasikan bahwa telah terjalin hubungan/relasi sosial antara perusahaan Migas dengan petani.

Proses Negosiasi Perusahaan Migas dan Pemilik Lahan

Hubungan/relasi sosial antara perusahaan Migas dengan pemilik lahan sudah terjalin selama kurang lebih 20 tahun. Sejak eksplorasi Migas pertama kali dilakukan, pemilik lahan menjadi lapisan pertama dari masyarakat yang ‘berhadapan’ dengan perusahaan Migas untuk pembebasan lahan dan pemberian kompensasi berupa sewa sebagai jalan tengah antara perusahaan Migas dan pemilik lahan untuk menyewa sebagian lahan pertanian.

Proses negosiasi jual beli lahan dilakukan melalui beberapa tahapan. Mulai dari persiapan, pendataan, kesepakatan hingga penetapan lokasi yang menjadi objek industri hulu Migas di Desa Rahayu. Dalam setiap tahapan tentu melibatkan beberapa elemen diantaranya ialah perusahaan itu sendiri, pemerintah daerah baik dari kabupaten, kecamatan, maupun pemerintah desa, kemudian ada dari perwakilan pemilik lahan, dan beberapa tokoh masyarakat pun terlibat. Adapun cara yang telah ditempuh oleh perusahaan untuk pembebasan lahan meliputi persiapan pengadaan tanah, pendataan awal lokasi, kesepakatan antara perusahaan Migas dan pemilik lahan, dan penetapan lokasi.

Kompensasi: Jalan Tengah Negosiasi Perusahaan Migas dengan Pemilik Lahan (Sewa)

Lokasi industri hulu minyak dan gas bumi yang berada sangat dekat dengan lahan pertanian, realitasnya berdampak buruk pada sektor pertanian di sekitarnya. Muncul gangguan pertumbuhan pada tanaman padi yang kala itu menjadi komoditas utama pertanian di Desa Rahayu. Tanaman yang semula dapat tumbuh dengan sangat cepat, namun berubah sangat lamban. Pada umumnya padi hanya berumur 90 hari dari tanam hingga waktu panen, tetapi untuk padi yang berada di dekat industri hulu Migas bisa mencapai umur 100 hari dan bahkan lebih. Hasilnya pun tidak sebanding dengan lamanya waktu yang digunakan untuk pertumbuhan. Berakar dari permasalahan itulah, teretuslah sistem sewa lahan milik warga setempat yang berada di sekitar lokasi pengeboran, dimana lahan tersebut disewa selama dua tahun oleh perusahaan. Penyewaan tersebut bisa diperpanjang sampai industri Migas tidak berdampak kepada produktivitas pertanian.

Bentuk relasi sosial saling menguntungkan tercermin dari sikap pemilik lahan yang menerima ganti rugi (kompensasi) dari pihak perusahaan Migas yang menyewa lahan. Pemilik lahan yang tanahnya disewa mendapatkan uang ganti rugi dengan jumlah nominal yang sepadan dengan hasil panen. Pembayaran ganti rugi dilakukan per dua tahun sekali oleh pihak perusahaan Migas. Terkait dampak operasional perusahaan Migas, pemilik lahan mendapatkan ganti rugi atau sewa, sehingga tanpa harus menggarap tanah sawah miliknya sudah mendapatkan penghasilan. Pemilik tanah sangat dimanjakan adanya kompensasi ganti rugi (sewa) lahan, sehingga pemilik tanah dengan senang hati jika tanahnya disewa. Hal ini dipengaruhi oleh keuntungan yang didapatkan dari hasil menyewakan tanah kepada pihak perusahaan. Pemilik tanah tidak perlu mengeluarkan modal untuk menggarap sawahnya namun sudah mendapatkan hasil dari proses sewa.

Adapun petani yang lahannya tidak disewa merasakan dampak dari keberadaan perusahaan migas dan tidak mendapatkan uang ganti rugi kecuali jika terdapat kerugian material. Petani 'Lain' yang lahannya tidak dibeli maupun disewa oleh Perusahaan menjadi pihak yang dirugikan karena mereka tidak mendapatkan ganti rugi namun terkena dampak aktivitas perusahaan yang mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian. Tidak semua petani kepemilikan tanah sawahnya dibeli ataupun dikontrak oleh perusahaan tambang minyak bumi. Namun, kehadiran perusahaan Migas dirasakan oleh petani di Desa Rahayu. Kondisi tersebut dikarenakan gangguan lingkungan alam akibat kegiatan operasional perusahaan tambang minyak dan gas bumi berpengaruh terhadap produktivitas dan hasil panen pertanian. Dalam menghadapi permasalahan tersebut petani mendapatkan tanggung jawab sosial dari perusahaan berupa ganti rugi dalam bentuk sewa lahan. Namun, tidak semua petani mendapatkannya, hanya petani yang lahannya dilewati pipa penyaluran minyak dan gas bumi perusahaan saja. Selain itu, ganti rugi diberikan apabila terjadi insiden di lapangan yang menyebabkan petani mengalami kerugian material.

Terlepas dari relasi negatif tersebut, ada pula relasi positif yang terjalin dari perusahaan migas dengan warga masyarakat. Salah satu dampak positif dari adanya industri minyak bumi adalah penyerapan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja perusahaan tambang minyak bumi sebagian kecil berasal dari warga asli Desa Rahayu. Hal ini dikarenakan terdapat aturan yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan warga lokal sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Pada umumnya warga setempat bekerja disektor pekerja kasar. Hal ini tentunya memunculkan relasi sosial antara perusahaan tambang minyak dan gas bumi dan tenaga kerja lokal di Desa Rahayu, dari pihak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, sedangkan dari pihak tenaga kerja pun membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kendala dan Strategi Dalam Relasi Sosial Antara Perusahaan Migas Dengan Warga Masyarakat Setempat

Adapun kendala yang dirasakan oleh masyarakat setempat ialah berupa getaran akibat kegiatan operasional perusahaan, suara bising dan aroma tidak sedap akibat kegiatan operasional Perusahaan Migas. Atas kendala yang dialami, warga Desa Rahayu yang berada di Ring 1, Ring 2, Ring 3 dan Ring 4 perusahaan Migas melakukan usaha/ respon adaptasi dengan melakukan unjuk rasa dengan menuntut pemberian ganti rugi atau yang biasa disebut dengan istilah kompensasi.

Pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada warga Desa Rahayu telah berjalan beberapa tahun, warga pun sudah menganggapnya sebagai ‘pemasukan tambahan rutin’ bulanan yang didapat secara cuma-cuma. Namun, pada akhirnya harus dihentikan pada tahun 2018 dengan berbagai pertimbangan. Diberhentikannya pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada warga Desa Rahayu disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ialah jumlah produksi minyak dan gas bumi perlahan menurun. Alasan kedua ialah perusahaan pengelola Migas di Desa Rahayu telah menerima ‘teguran’ dari SKK Migas. Perusahaan disarankan untuk tidak memberikan kompensasi berupa uang tunai karena bisa menciptakan ketergantungan kepada perusahaan. Keputusan yang sudah bulat itu, terpaksa harus diterima oleh warga Desa Rahayu meskipun harus menelan kekecewaan. Namun, pada kenyataannya sebagian dari warga telah ‘berdamai’ dengan keadaan dan memilih untuk membuka usaha makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh karyawan perusahaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa warga ada yang menjual makanan berat, makanan ringan, dan aneka es. Perusahaan Migas di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tetap melakukan tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga masyarakat setempat misalnya ialah di bidang kesehatan terdapat program “Sahabat Pertamina” yang berkolaborasi dengan *stakeholder* setempat.

Simpulan

Aksi pembebasan lahan dalam konteks waktu ketika Indonesia berusaha untuk mencukupi kebutuhan minyak dan gas nasional. Konsekuensi berupa respon dengan alasan pemilik lahan/petani menerima aksi pembebasan lahan pertanian dipengaruhi faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah pusat dan intervensi pemerintah daerah serta faktor internal berupa keuntungan dari harga tanah tinggi. Sedangkan respon lain berupa alasan pemilik lahan menolak aksi pembebasan lahan pertanian menjadi lahan industri hulu migas dipengaruhi pula oleh faktor eksternal berupa kehadiran pihak asing (*Londho*) dan perusahaan Migas memberikan harga beli yang rendah, faktor internal berupa kehilangan mata pencaharian sebagai petani dan produktifitas pertanian menurun.

Kaitannya dengan konteks waktu setelah kurang lebih 33 tahun perusahaan Migas beroperasi di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, hubungan aksi dan konsekuensi responnya tercermin dalam relasi sosial. *Pertama*, relasi sosial yang menguntungkan antara perusahaan Migas dan pemilik lahan yang muncul ketika adanya proses negosiasi perusahaan Migas dan pemilik lahan untuk pembebasan lahan dan pemberian kompensasi berupa sewa sebagai jalan tengah antara perusahaan Migas dan pemilik lahan untuk menyewa sebagian lahan pertanian. *Kedua*, relasi sosial yang merugikan petani yang tidak mendapatkan sewa dari perusahaan Migas. *Ketiga*, relasi sosial yang menguntungkan antara perusahaan migas dan tenaga kerja lokal. Keberadaan perusahaan migas di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tentunya membutuhkan tenaga kerja lokal dan sebaliknya tenaga kerja membutuhkan pekerjaan.

Daftar Pustaka

- Fadli, MR (2021) Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 41.
- Fajar, M, & Mei, ET (2019) Sikap Masyarakat Terhadap Pertambangan Minyak Di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3), 1-13.

- Hasanah, H (2016) TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 42.
- Hassan, A (2013) Review of The Global Oil And Gas Industry: A Concise Journey From Ancient Time to Modern World. *Petroleum Technology Development Journal*, 3(2), 123-141.
- Jati, KP, Sugiyanto, H, & Muryani, C (2017) Dampak Penambangan Minyak Tradisional Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora). *Jurnal GeoEco*, 3(1), 50-67.
- Listiyani, S (2018) Dampak Industri Pertambangan Minyak Bumi Terhadap Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *Swara Bhumi*, V(6), 78-84.
- Nahar, Y (2014) Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Terhadap Hubungan Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat di Sekitar Wilayah Tambang). *Jurnal Academica Fisip Untad*, 06(02), 1359-1371.
- Ngene, S, Tota-Maharaj, K, Eke, P, & Hils, C (2016) Environmental and Economic Impacts of Crude Oil and Natural Gas Production in Developing Countries. *International Journal of Economic, Energy and Environment*, 1(3), 64-73.
- Rifai'i, AB, & Mardiansjah, FH (2018) Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Petani Sekitar Lokasi Pertambangan Banyu Urip Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. *Tata Loka*, 20(1), 50-64.
- Saharuddin (2007) *Antropologi Ekologi*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Sari, EN, & Hidayah, N (2017) Fenomena Kehidupan Buruh Gendong Perempuan Di Pasar Giwangan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Somantri, GR (2005) Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57-65.
- Spradley, JP (2006) *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wihartina, SR (2015) Dampak Eksploitasi Minyak Bumi Banyu Urip Terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar Lokasi Pertambangan (Di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). *Swara Bhumi*, 1(1), 97-101.
- Zaki, AR, Hakim, A, & Nuraini, F (2013) Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 125-131.